

BAB I

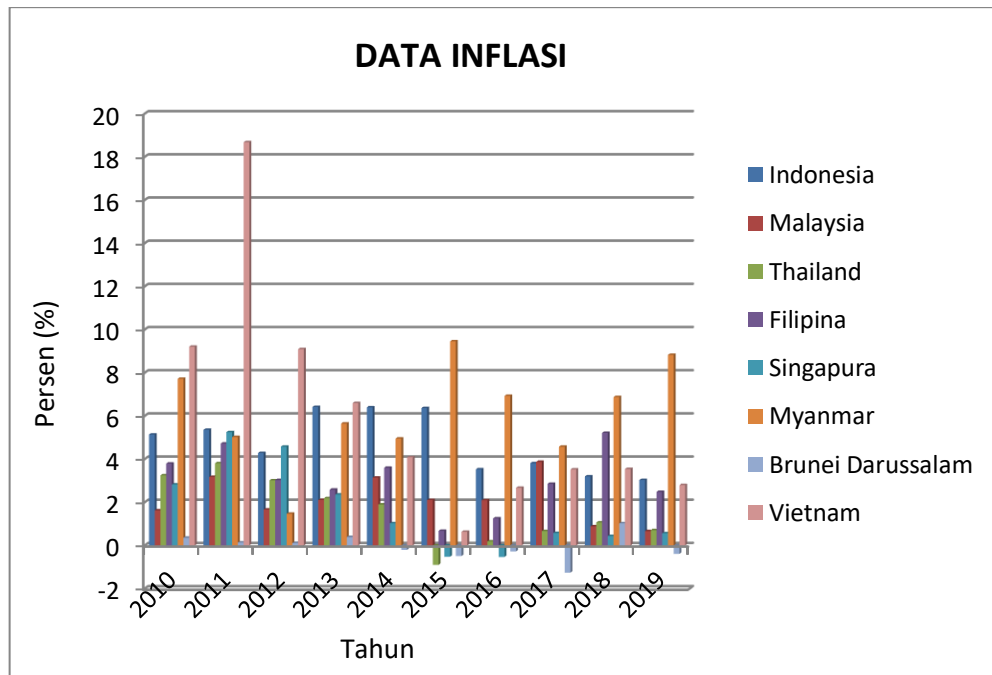
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada umumnya baik di negara maju maupun berkembang masih rentan terhadap ketidakstabilan kegiatan perekonomian. Perekonomian selalu menjadi pusat perhatian yang dianggap penting karena apabila perekonomian suatu negara berada dalam kondisi yang tidak stabil maka akan menimbulkan masalah-masalah ekonomi diantaranya adalah tingginya tingkat pengangguran, rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya tingkat inflasi. Inflasi merupakan salah satu indikator perekonomian yang sampai saat ini masih menjadi bagian yang penting dan menarik untuk diamati karena dialami oleh semua negara khususnya di negara berkembang. Perkembangan laju perubahannya selalu diusahakan untuk berada di titik aman yakni berada pada tingkat yang rendah dan tetap stabil agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian suatu negara. Inflasi sebenarnya mengandung dampak negatif dan positif, namun inflasi seringkali lebih banyak menimbulkan dampak negatifnya (Yuliandari, 2016)

Secara umum dampak inflasi dapat mempengaruhi distribusi pendapatan, alokasi faktor produksi serta produk nasional. Inflasi pada dasarnya perlu dihindari sebagaimana permasalahan ekonomi yang lain dikarenakan dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Inflasi cenderung menurunkan taraf kemakmuran masyarakat suatu negara. Salah satu dampak yang dirasakan dari adanya inflasi adalah merosotnya nilai uang yang secara riil dipegang masyarakat. Pendapatan masyarakat yang jumlahnya tetap yang tidak dapat

mengikuti kenaikan harga akan menyebabkan pendapatan riil masyarakat tersebut menurun.



Sumber : World Bank

Grafik 1.1

Data Inflasi di Delapan di Delapan Negara ASEAN

Berdasarkan gambar grafik diatas menunjukkan data inflasi di delapan negara ASEAN pada tahun 2010 sampai pada tahun 2019. Dari 8 negara ASEAN tersebut memiliki tingkat inflasi yang tidak sama. Negara Vietnam memiliki tingkat inflasi yang tinggi pada tahun 2010-2011 hingga mencapai 18.67%, namun pada tahun berikutnya terus mengalami penurunan sampai pada tahun 2019. Sementara Myanmar memiliki tingkat inflasi yang berfluktuasi, pada tahun 2010-2012 mengalami penurunan hingga mencapai 1.46%, dan dari tahun 2013-2015 mengalami kenaikan mencapai 9.45%, selanjutnya pada tahun berikutnya mengalami penurunan sampai pada tahun 2017, dan dari tahun 2018-

2019 mengalami kenaikan kembali mencapai 8.82%. Sementara itu negara Brunei Darussalam memiliki tingkat inflasi yang sangat rendah, dimana titik tertingginya mencapai 1.02% dan titik terendahnya mencapai -0.48%.

Tingkat inflasi di Vietnam pada tahun 2011 cukup tinggi hingga mencapai 18.67% disebabkan karena kenaikan harga pangan, kenaikan harga rumah dan bahan baku bangunan yang menjadi faktor penting, selain itu inflasi meningkat juga disebabkan pemerintah Vietnam mendesak bank-bank untuk menurunkan tingkat suku bunga dalam keperluan bisnisnya. Menurut Badan Pusat Statistik Vietnam mengatakan bahwa kenaikan harga makanan dan minuman menjadi penentu kenaikan inflasi. Inflasi yang tinggi di Vietnam mengakibatkan banyak keluhan dari masyarakat. Pada tahun 2015 Vietnam melakukan kebijakan moneter dengan hasil positif diantaranya: mampu menyesuaikan kurs mata uang secara luwes yang dilakukan oleh Bank Negara Vietnam, meningkatkan suku bunga, pasar emas dalam negeri berlangsung secara stabil, keseluruhan instrumen pembayaran meningkat, mampu mengatasi masalah perkreditan (Vovworld).

Tingkat inflasi di Brunei Darussalam rendah dibawah 1% dikarenakan di negara Brunei Darussalam kaya akan sumber alam minyak dan gas yang semakin meningkat. Tidak di hanya di sektor tersebut, namun juga karena adanya peningkatan sektor penguatan institusi, kesehatan serta pendidikan dasar. Pemerintah Brunei Darussalam berusaha untuk menstabilkan harga dengan kebijakan moneter sehingga inflasi dapat ditekan. Di Singapura tingkat inflasi juga rendah hanya berkisar 1-2%. Sementara di Myanmar tingkat inflasi cukup tinggi dan berfluktuasi disebabkan karena adanya kekacauan politik dan rezim militer. Tingkat inflasi di Malaysia pada tahun 2017 merupakan yang

tertinggi mencapai 3.87% yang disebabkan karena adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (Seruni, 2012).

Inflasi di Filipina pada tahun 2018 mencapai 5.21% merupakan tingkat inflasi yang paling tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan harga listrik, gas, bahan bakar dan transportasi yang melonjak, selain itu karena adanya kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah AS yang berdampak pada kenaikan harga barang di Filipina. Kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Filipina untuk mengatasi inflasi yaitu dengan menerapkan kebijakan bahan bakar minyak (BBM) ditentukan oleh mekanisme pasar (Merdeka.com). Sementara di Thailand memiliki tingkat inflasi yang rendah sehingga harga-harga barang terjaga dengan baik. Pada tahun 2018 tingkat inflasi sebesar 1%, inflasi yang rendah ini sangat menguntungkan bagi konsumen, namun jika dibiarkan secara terus-menerus menyebabkan perekonomian di Thailand akan semakin buruk (Kompas.com).

Salah satu bentuk pengendalian tingkat inflasi yaitu dengan menerapkan kebijakan moneter, dimana kebijakan ini dapat mempengaruhi variabel-variabel moneter lainnya seperti jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan nilai tukar. Inflasi yang tinggi menyebabkan kenaikan harga-harga barang dalam negeri menjadi lebih meningkat, hal ini akan menyebabkan barang-barang dalam negeri tersebut tidak mampu bersaing dengan harga barang luar negeri karena relatif lebih rendah sehingga akan lebih cenderung untuk mengimpor barang dari luar negeri. Karena di dalam negeri mengalami tingkat inflasi yang tinggi maka akan membutuhkan peningkatan jumlah uang beredar yang tinggi pula untuk keperluan transaksi tersebut. Meningkatnya jumlah uang beredar yang sangat tinggi akan menyebabkan ketidakseimbangan dalam pasar uang dan akhirnya

dapat menimbulkan depresiasi nilai tukar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat inflasi masing-masing negara menyebabkan mata nilai tukar mata uangnya mempengaruhi mata uang asing (Musyaffa', 2017).

Nilai tukar atau kurs adalah harga mata uang suatu negara yang dibandingkan dengan mata uang negara lain. Dalam perekonomian Negara ASEAN, nilai tukar merupakan salah satu harga yang sangat penting karena keseimbangan (equilibrium) dari permintaan dan penawaran dapat menentukan nilai tukar. Hal ini disebabkan karena nilai tukar memiliki dampak yang besar terhadap neraca pembayaran dan variabel makroekonomi lainnya. Selain itu, nilai tukar memiliki resiko yaitu apabila terjadi pergerakan atau perubahan nilai tukar yang akan berdampak pada harga-harga barang dan jasa domestik.

Di Indonesia nilai tukar cukup tinggi mencapai 14.000 per US Dollar pada tahun 2019 dan pertumbuhan ekonomi melambat, hal ini disebabkan karena adanya faktor eksternal. Pelemahan nilai tukar rupiah di Indonesia dikarenakan terhambatnya ekonomi global. Hal ini juga dirasakan oleh Malaysia, dimana nilai tukar Ringgit juga ikut melemah. Sementara di Myanmar melakukan perubahan kebijakan dimana nilai tukar mata uang Kyat sebelumnya ditentukan oleh pemerintah dan akan ditentukan oleh mekanisme pasar (nilai tukar tunggal) sehingga nantinya nilai tukar Kyat akan berfluktuasi mengikuti pergerakan permintaan dan penawaran di pasar mata uang. Namun pemerintah Myanmar akan ikut campur tangan apabila terjadi pelemahan yang signifikan atas nilai tukar Kyat (Kompas.com). Di Singapura melakukan kebijakan moneter yaitu mengurangi sedikit laju rentang nilai mata uangnya serta mengendalikan nilai tukar dolar Singapura terhadap mata uang negara lain. Otoritas Moneter Singapura merupakan otoritas yang mengelola kebijakan moneternya, otoritas ini

juga dapat menyesuaikan laju naik maupun turun mata uangnya terhadap mata uang negara lain (Bisnis.com).

Selain nilai tukar, variabel yang mempengaruhi tingkat inflasi yaitu tingkat suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar oleh nasabah (peminjam) atas pinjaman yang diterima dan merupakan imbalan bagi yang pemberi pinjaman. Tingkat suku bunga merupakan salah satu indikator yang dapat menentukan tinggi rendahnya inflasi di Negara ASEAN. Apabila dalam suatu negara ingin menekan dan menurunkan tingkat inflasi maka negara tersebut harus mampu mengendalikan kenaikan harga-harga barang dan jasa dengan melalui mengurangi jumlah uang yang beredar, salah satu bentuk pengendaliannya yaitu dengan menaikkan tingkat suku bunga pinjaman. Semakin tinggi tingkat suku bunga di suatu negara tersebut maka jumlah uang beredar akan semakin menurun karena masyarakat tidak akan meminjam uang pada saat tingkat suku bunga tinggi sehingga tingkat inflasi akan semakin rendah. Namun sebaliknya, apabila tingkat suku bunga semakin rendah maka jumlah uang beredar akan meningkat. Hal ini akan menyebabkan tingkat inflasi akan semakin tinggi. Sehingga pergerakan tingkat suku bunga perlu dikontrol dan dikendalikan agar perekonomian berjalan lebih stabil dan kondusif (Mahendra, 2016)

Sejumlah negara di Asia Tenggara yaitu Thailand, Malaysia dan Filipina menerapkan kebijakan moneter yaitu menurunkan tingkat suku bunga. Pada tahun 2019 tingkat suku bunga di Thailand sebesar 4.08%, Bank Sentral Thailand memiliki kemungkinan terbesar, diantara ketiga bank sentral di Asia Tenggara untuk menahan kebijakan moneternya. Sejak Bank of Thailand menaikkan suku bunga pada tahun 2018, perubahan kebijakan pertama tahun

2015, nilai tukar Bath mengalami penguatan terbesar di Asia Tenggara. Sementara Bank Negara Malaysia menerapkan kebijakan dengan menurunkan tingkat suku bunga acuan sebesar 25 basis poin dan pemerintah Malaysia tetap berpegang pada target pertumbuhan suku bunga 4.9% untuk tahun 2019. Nilai tukar Ringgit telah terdepresiasi terhadap dolar AS pada tahun 2019, sedangkan pasar ekuitasnya tetap menjadi salah satu yang berkinerja terburuk di Asia. Di Filipina melakukan pelanggaran kebijakan moneternya dengan tujuan untuk mengurangi pengetatan kebijakannya tahun lalu dan menurunkan rasio cadangan wajib untuk bank-bank (Bisnis.com).

Jumlah uang beredar (M2) merupakan jumlah uang yang beredar di tangan masyarakat yang terdiri dari uang kartal dan uang giral (M1) dan uang kuasi. Jumlah uang beredar dan inflasi merupakan dua variabel yang sangat mempengaruhi perekonomian di ASEAN, karena jumlah uang beredar dan tingkat inflasi memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu perekonomian maka perlu adanya kebijakan dan pengendalian dari pemerintah untuk menstabilkan perekonomian negara. Menurut Anggraini (2012) menyatakan bahwa, Perubahan jumlah uang beredar baik jika jumlah uang semakin turun maupun semakin naik akan berpengaruh terhadap kegiatan perekonomian. Jika jumlah uang yang beredar di masyarakat terus mengalami peningkatan maka akan mendorong terjadinya inflasi atau kenaikan harga dan jika hal ini dibiarkan terus-menerus maka dalam jangka panjang pertumbuhan perekonomian suatu negara akan terganggu dan tidak stabil. Namun sebaliknya jika inflasi di suatu negara sangat rendah maka akan menyebabkan kelesuan kegiatan perekonomian dan jika hal ini dibiarkan dan tidak dikendalikan secara serius maka kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat akan turun. Pertumbuhan

jumlah uang beredar sangat mempengaruhi kegiatan aktivitas perekonomian, pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat sangat menentukan tinggi atau rendahnya inflasi di suatu negara sehingga perlu dikontrol oleh pemerintah atas pertumbuhan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Secara garis besar teori kuantitas berpendapat bahwa kenaikan inflasi hanya terjadi ketika ada penambahan jumlah uang beredar, artinya jika tidak ada penambahan jumlah uang beredar maka tidak akan terjadi inflasi, dengan kata lain terdapat hubungan kausalitas yang terjadi antara jumlah uang beredar dengan inflasi. Menurut Susilowati (2016) menyatakan, Hubungan kausalitas yang terjadi antara jumlah uang beredar dengan inflasi tergambar dalam teori Irving Fisher dan Keynes. Inflasi (peningkatan harga) terjadi disebabkan karena adanya peningkatan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tanpa adanya penambahan volume penawaran uang tidak akan terjadi inflasi. Inflasi juga dapat diartikan dengan melemahnya nilai mata uang secara terus menerus karena meningkatnya persediaan uang di tangan masyarakat, dan permintaan barang akan naik, namun kenaikan permintaan barang tersebut tidak diiringi dengan kenaikan penawaran barang yang tersedia di pasar, maka akan menyebabkan harga-harga barang dan jasa akan mengalami kenaikan. Hal ini yang menunjukkan bahwa ada indikasi mengenai hubungan fungsional antara jumlah uang beredar dengan inflasi.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas menunjukkan bahwa tingkat inflasi merupakan salah satu permasalahan ekonomi moneter yang sering terjadi diberbagai negara terutama di negara ASEAN. Oleh karena itu, penulis ingin melakukan penelitian mengenai sumber-sumber yang dapat mendorong terjadinya inflasi di negara ASEAN dalam kurun waktu belakangan ini dengan

judul **“Pengaruh Jumlah Uang Beredar, Tingkat Suku Bunga dan Nilai Tukar Terhadap Tingkat Inflasi di Delapan Negara ASEAN”**.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya dapat ditemukan Riset Gap yaitu dimana dalam penelitian ini menggunakan metode panel. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan metode regresi linier berganda dengan tema yang sama yaitu pengaruh jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap tingkat inflasi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di delapan negara ASEAN tahun 2010-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh suku bunga terhadap tingkat inflasi di delapan negara ASEAN tahun 2010-2019 ?
3. Bagaimana pengaruh nilai tukar terhadap tingkat inflasi di delapan negara ASEAN tahun 2010-2019 ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah uang beredar terhadap tingkat inflasi di delapan negara ASEAN 2010-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga terhadap tingkat inflasi di delapan negara ASEAN 2010-2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh nilai tukar terhadap tingkat inflasi di delapan negara ASEAN 2010-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini secara teoritis dapat menjadi pengembangan teori ekonomi makro dan ekonomi moneter yang terkait dengan pengaruh jumlah uang beredar, tingkat suku bunga dan nilai tukar terhadap tingkat inflasi.

2. Manfaat praktis

Dari hasil penelitian ini secara praktis dapat memberikan manfaat bagi kebijakan pemerintah dalam upaya mengendalikan jumlah uang beredar, tingkat suku bunga, nilai tukar dan tingkat inflasi agar kegiatan perekonomian berjalan dengan stabil.